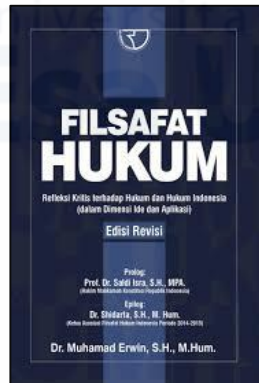


PERIODE TAHUN 2024



**Perpustakaan
Universitas
Esa Unggul**

**Jalan Arjuna Utara
No. 9, Kebon Jeruk,
Jakarta, 11510
(021) 5674223 ext 282
(021) 5674152 (hunting),
Fax (021) 5674248**



**Filsafat Hukum: Refleksi Kritis
terhadap Hukum dan Hukum Indonesia
(Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)**

Author : Muhamad Erwin
No. Class : 340.1 ERW f
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

Description:

Dengan memahami filsafat hukum akan menuntut masyarakat, kalangan akademisi, praktisi dan regulator hukum untuk menggunakan akal dan hatinya dengan berpikir mendalam, bertanya dan menggali kembali apa-apa yang diperlukan untuk membuat suatu kerangka hukum yang kokoh, yang mengedepankan tujuan adanya hukum, sumber-sumber hukum serta poros yang menjadi garis lingkaran hukum agar tetap edar pada tempatnya.

Dari buku ini penulis mengajak pembaca untuk melihat lebih jeli, dalam dan jauh mengenai hakikat hukum, mengetahui kebenaran, keadilan, kemanusiaan, nilai, etika dan moral di balik hukum, mencari mulai dari yang terbuka sampai kepada yang masih tersembunyi di dalam hukum, serta memahami hukum sebagai pertimbangan nilai dan postulat, hingga untuk kembali pada suatu kesadaran, memenuhi hukum-Nya.

Kehadiran buku yang ditulis oleh Muhamad Erwin ini paling tidak telah berupaya mengurangi kesan sebagian orang bahwa filsafat hukum itu menakutkan, sulit dipahami dan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Lebih jauh lagi, buku ini memiliki misi bahwa dengan merenungi nilai-nilai dasar dalam hukum, maka dapatlah dipahami untuk bagaimana menjalankan hukum itu secara adil.

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
(Ketua Ombudsman Republik Indonesia)



Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Author : Achmad Edi Subiyanto dan Anna Triningsih
No. Class : 347.05 SUB p
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

Description:

Materi dalam buku yang berjudul Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, bersumber dari peraturan perundang-undangan yang meliputi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah mengalami perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, peraturan Mahkamah Konstitusi, serta dalam praktik dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Buku ini menguraikan mengenai praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi yang meliputi, administrasi peradilan, pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, pengucapan putusan, dan penyampaian salinan putusan kepada para pihak. Selain itu untuk memudahkan pembaca memahami bentuk-bentuk dokumen hukum pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi, dalam buku ini dilampirkan juga contoh-contoh dokumen hukum tersebut, antara lain akta bentuk permohonan, registrasi perkara konstitusi, serta berita acara penyampaian.

Hukum acara Mahkamah Konstitusi mencakup lima jenis perkara yang menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan pendapat DPR atas dugaan presiden/wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden menurut UUD. Kelima jenis perkara tersebut diuraikan dalam buku ini, baik mengenai hukum acara yang bersifat umum untuk kesemua jenis perkara yang menyangkut administrasi perkara, administrasi persidangan, dan administrasi setelah pengucapan putusan, maupun hukum acara yang bersifat khusus terhadap satu per satu untuk tiap-tiap jenis perkara, mengenai prosedur pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan pembacaan atau pengucapan putusan.



Hukum Acara Pidana Indonesia, ed 2

Author : Andi Hamzah
No. Class : 345.05 HAM h
Lokasi : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

Description:

Ruang lingkup hukum acara pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dengan terciptanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berarti pertama kalinya Indonesia melakukan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap, meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung. Lebih daripada itu, Bahkan sampai meliputi peninjauan kembali.

Buku ini ditulis oleh Prof. Dr.jur. Andi Hamzah, seorang Guru Besar Hukum Pidana dan Acara Pidana, menyajikan seluk beluk hukum acara pidana di Indonesia dengan berbagai latar belakangnya yang didukung oleh berbagai sumber hukum yang diperlukan dengan data-data kepustakaan yang luas. Penulis mampu menjelaskannya secara detail berdasarkan pengalamannya baik sebagai jaksa maupun dosen serta argumentasinya yang kuat.



[Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, ed 2](#)

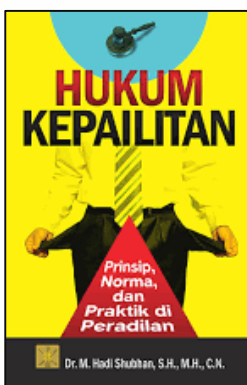
Author : M. Yahya Harahap
No. Class : 347.05 HAR h
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

Description:

Buku ini sangat lengkap memuat secara komprehensif dan terperinci hal-hal yang tidak pernah diulas oleh penulis lain dalam buku dengan topik sejenis. Berdasarkan pengetahuan teori hukum yang luas dan pengalaman praktik sebagai seorang yang telah meniti karier sebagai hakim selama 40 tahun, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung, penulis telah berhasil menuangkan pemikirannya dengan menggabungkan kedua unsur tersebut (teori dan praktik) ke dalam penulisan buku yang bermutu ini.

Dalam Edisi Kedua, buku ini berisikan tentang tata cara (prosedur) beracara di pengadilan perdata, yaitu sebelum pada saat, dan sesudah persidangan yang dituangkan dalam 17 (tujuh belas) bab (ada tambahan tiga bab baru, yaitu bab empat sampai bab enam) dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru. Bab pertama membahas tentang surat kuasa mengenai pengertian, jenis, dan bentuknya. Bab dua, Bab tiga, dan Bab tujuh mengkaji tentang surat gugatan termasuk surat gugatan perwakilan kelompok (class action). Bab empat tentang masuknya Pihak Ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan. Bab lima tentang Lingkup Gugatan Citizen Lawsuit. Bab 6 tentang prejudicieel geschil antara perkara perdata dengan perkara pidana. Bab delapan tentang kekuasaan mengadili yang dimiliki hakim. Bab sembilan tentang tata cara pemanggilan dan proses yang mendahulukannya. Bab sepuluh tentang putusan akta perdamaian dikaitkan dengan sistem mediasi. Bab sebelah tentang penyitaan meliputi sita atas kapal laut dan kapal terbang. Bab dua belas tentang proses acara verstek. Bab tiga belas tentang eksepsi dan bantahan. Bab empat belas tentang gugatan reconversi. Bab lima belas tentang pembuktian. Bab enam belas tentang pemeriksaan setempat dan pendapat ahli dan terakhir bab tujuh belas tentang putusan pengadilan.

Setelah membaca buku ini, para pembaca akan mendapatkan pengayaan wawasan dan pengetahuan mengenai aspek-aspek hukum acara perdata secara menyeluruh. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pencari keadilan, praktisi hukum dan umum, serta perkembangan ilmu hukum acara perdata itu sendiri di tanah air.

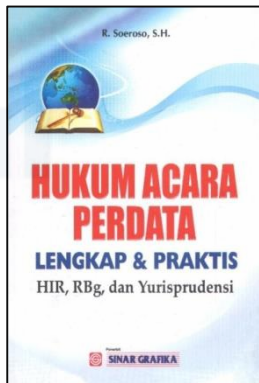


[Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, ed 1](#)

Author : M. Hadi Shubhan
No. Class : 346.078 SHU h
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

Description:

Buku Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan ini menyajikan secara menyeluruh dan sistematis masalah kepailitan baik yang berlaku umum maupun khusus dalam hukum positif Indonesia. Pemaparan diawali dengan prinsip-prinsip kepailitan dalam berbagai sistem hukum dan penormaan berbagai prinsip tersebut dalam hukum positif Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah aspek hukum kepailitan dalam perseroan terbatas di Indonesia dan bagaimana penerapan prinsip dan norma hukum kepailitan di Indonesia. Untuk menjembatani pemaparan teoretis dan aplikasi praktis di lapangan, buku ini dilengkapi dengan sejumlah studi kasus yang amat menarik.



Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis: Hir, Rbg dan Yurisprudensi, ed 1

Author : R. Soeroso
No. Class : 347.05 SOE h
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

Description:

R. Soeroso, S.H. seorang pakar hukum yang sangat produktif, menyusun Hukum Acara Perdata yang dipergunakan dalam hukum nasional secara lengkap, meliputi:

- HIR, peraturan hukum acara perdata yang berlaku untuk Jawa dan Madura
- RBg, peraturan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura dan
- Yurisprudensi.

Penyusunan peraturan perundang-undangan di atas dibuat secara praktis, karena HIR dan RBg disusun berdampingan, serta Yurisprudensi yang berkaitan disusun secara langsung di bawahnya. Dengan demikian, siapa pun dapat dengan mudah dan langsung mengetahui pasal pasal mana yang diatur oleh HIR dan RBg serta penerapannya dalam Yurisprudensi.

Buku ini akan sangat dibutuhkan mahasiswa, pengacara, hakim, konsultan hukum, dan seluruh aparat penegak hukum. Tak ketinggalan juga buku ini bisa menjadi bahan bacaan bagi siapa saja yang ingin beracara di pengadilan.

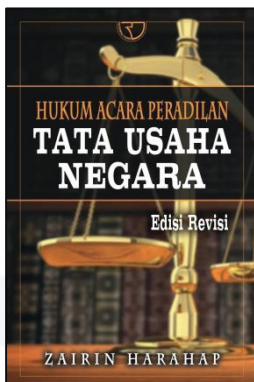
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, ed rev

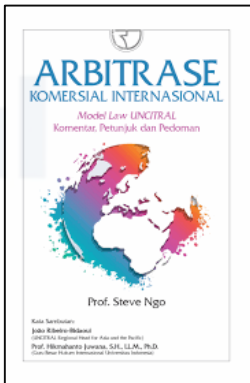
Author : Zairin Harahap
No. Class : 342.06 HAR h
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

Description:

Dalam hampir setiap aktivitas yang dilakukan oleh warga-masyarakat dapat dikatakan tidak mungkin tidak berurusan dengan pemerintah (badan atau pejabat tata usaha negara) terutama dalam mengurus berbagai macam perizinan atau surat-surat lainnya. Tidak jarang warga-masyarakat yang memiliki urusan tersebut diperlakukan secara sewenang-wenang atau ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu juga di bidang kepegawaian, tidak sedikit kasus yang mengindikasikan adanya tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya. Perbuatan atau tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang seperti itu tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Administrasi) adalah ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga-masyarakat atas tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun, di sisi lain, tidak banyak warga-masyarakat memahami bagaimana cara dirinya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Buku ini mencoba untuk menawarkan cara dimaksud. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya penting dibaca oleh mahasiswa fakultas hukum dan para pejabat pemerintah, tetapi juga masyarakat luas terutama (calon) pengusaha dan pegawai negeri sipil agar di satu sisi dapat memahami bagaimana cara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Di sisi lain, untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.





Arbitrase Komersial Internasional: Model Law UNCITRAL Komentar, Petunjuk dan Pedoman, ed 1

Author : Steve Ngo
No. Class : 341.52 NGO a
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

Description:

Praktik arbitrase komersial internasional saat ini dan di masa depan tidak akan lengkap tanpa memahami United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law. Indonesia pun sudah tak asing lagi dengan arbitrase komersial internasional dan dengan semakin banyaknya kasus-kasus arbitrase yang melibatkan pihak-pihak Indonesia serta partisipasi pengacara di Indonesia, maka banyak manfaat yang dapat diambil dari memahami instrumen monumental UNCITRAL yaitu Model Law tentang arbitrase komersial internasional.

Di buku ini dipaparkan mengenai UNCITRAL Model Law. Terdiri dari beberapa bagian, pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan pengenalan terhadap UNCITRAL Model Law. Kemudian disajikan secara menyeluruh dan mendetail terkait pasal demi pasal yang menjelaskan maksud dan makna dari setiap ketentuan Model Law, yang diikuti dengan sejumlah komentar. Adapun setiap komentar disertai dengan beberapa contoh kasus internasional untuk bacaan dan penelitian lebih lanjut serta studi kasus. Berikutnya, dipaparkan secara ringkas perkembangan arbitrase internasional modern. Di buku ini dihadirkan pula sejumlah lampiran yang sangat berguna mulai dari diagram skematis yang berkaitan dengan prosedur arbitrase komersial internasional dan contoh prosedur peraturan arbitrase, daftar istilah umum yang sering digunakan dalam proses arbitrase komersial internasional dan daftar negara yang telah mengadopsi model hukum, hingga teks Konvensi New York 1958.

Buku ini dapat dijadikan bahan bacaan dan bermanfaat sekali baik bagi akademisi, mahasiswa maupun praktisi hukum yang ingin mengenal, mempelajari atau mendapatkan informasi kunci berkaitan dengan hukum, pelaksanaan, dan praktik arbitrase komersial internasional.



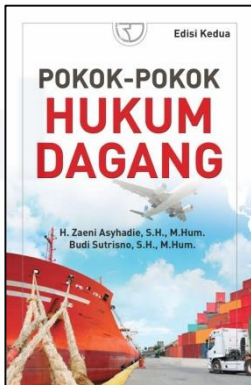
Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia, ed 1

Author : Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma
No. Class : 344.01 ASY h
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

Description:

Buku ini penting untuk dimiliki oleh semua pihak yang bergelut dalam bidang ilmu hukum secara akademik maupun praktik, karena buku ini bukan hanya sekedar menginventarisasi bahan hukum yang ada sebelum maupun sesudah tahun 2000, namun juga mengomparasikannya sehingga buku ini dapat menambah khazanah buku-buku hukum ketenagakerjaan yang diperlukan oleh mahasiswa atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Di semua perguruan tinggi, khususnya pada Fakultas Hukum, hukum ketenagakerjaan merupakan matakuliah nasional, yang artinya, matakuliah wajib diprogramkan oleh semua mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN).

Pada buku ini telah dilakukan berbagai revisi dan penyempurnaan yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan terkini di dalam peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karena itu, dengan revisi dan penyempurnaan yang relatif komprehensif, buku ini tentunya akan tetap eksis sebagai bahan acuan bagi mahasiswa dalam melanjutkan studinya, dan pula semoga semakin bermanfaat bagi semua pihak.



Pokok-Pokok Hukum Dagang, ed 2

Author : Budi Sutrisno dan Zaeni Asyhadie
No. Class : 346.07 ASY p
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

Description:

Hukum Dagang merupakan mata kuliah pokok dan wajib diprogramkan oleh semua mahasiswa Fakultas Hukum se Indonesia. Meskipun istilah dagang sendiri tidak dijumpai lagi dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, sebagai asal-muasal munculnya istilah Hukum Dagang, namun mata kuliah Hukum Dagang masih tetap ada berdampingan dengan mata kuliah Hukum Perusahaan dan Hukum Bisnis.

Oleh karena itu, sekarang amat sangat banyak buku-buku literatur Hukum Dagang yang disusun oleh para sarjana (pakar), para praktisi dan pengajar dengan sistematik yang berbeda satu sama lain, tergantung dari keinginan dan silabi yang ada di Perguruan Tinggi/Fakultasnya masing-masing.

Buku ini disusun dengan memperhatikan silabi (Satuan Acara Perkuliahan) di Fakultas Hukum-Fakultas Hukum yang ada, sehingga sistematika yang termuat dalam buku ini diupayakan mewakili dan merangkum silabi (Satuan Acara Perkuliahan) tersebut.

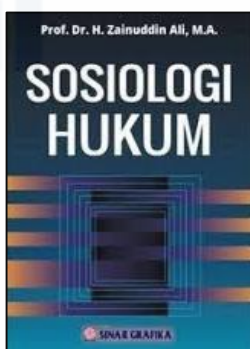
Dengan uraian yang singkat, fleksibel dan diupayakan supaya mudah dimengerti, dalam buku ini termuat hal-hal yang mendasar dalam Hukum Dagang, seperti :

- Berbagai istilah, pengertian Hukum Dagang.
- Pengusaha dan para pembantunya.
- Bentuk-bentuk perusahaan bukan badan hukum
- Persereroan Terbatas, Koperasi dan lain-lain.

Demikian juga dalam buku ini diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan :

- Pengangkutan
- Perasuransian
- Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dan
- Kepailitan

Buku ini bisa dipergunakan oleh para mahasiswa sebagai bahan acuan/literatur dalam mengikuti matakuliah Hukum Dagang, dan bagi pihak lainnya yang berkepentingan.



Sosiologi Hukum, ed 1

Author : Zainuddin Ali
No. Class : 340.115 ALI s
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

Description:

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dalam masyarakat secara empiris analisis. Dengan mempelajari sosiologi hukum dapat dianalisis sebanyak mungkin kondisi aktual dalam masyarakat sehingga hukum berlaku secara efektif.

Buku ini mengkaji prinsip-prinsip dasar dan penting yang terkandung dalam kajian sosiologi hukum yang dituangkan secara utuh, runtut, dan jelas dalam 7 bab. Selain itu, pembahasan disertai dengan fakta-fakta historis terkait kepatuhan hukum dalam masyarakat dan contoh kasus penerapan aturan hukum. Hal ini ditungkn secara luas dan padu untuk memberi gambaran sejauh mana sosiologi hukum memainkan peran dalam mengubah sikap masyarakat untuk menjunjung tinggi aaturn hukum positif di tanah air.

Buku ini patut dijadikan referensi yang utama bagi mahasiswa hukum, baik pada jenjang strata 1, maupun strata 2, aparat penegak hukum, praktisi hukum, dan para pembuat kebijakan di tanah air.



Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, ed rev

Author : Huala Adolf
No. Class : 341.5 ADO h
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

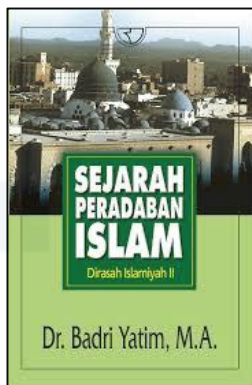
Description:

Sengketa-sengketa internasional dalam era globalisasi dewasa ini memang sangat rentan terjadi dipicu oleh berbagai macam perbenturan kepentingan (conflict of interest) antar negara yang kerap timbul. Upaya-upaya penyelesaian terhadapnya tentunya mutlak diperlukan agar sengketa-sengketa tersebut tidak meluas dan berkepanjangan yang lambat laun dapat mengancam perdamaian dunia. Untuk menghadapinya tentu saja diperlukan aturan-aturan penyelesaian sengketa internasional yang berdasarkan prinsip-prinsip perdamaian dan keamanan internasional sehingga apa pun keputusan yang dicapai nanti dapat diterima secara baik oleh para pihak yang bersengketa.

Buku ini menjabarkan secara komprehensif dan intensif perihal penyelesaian sengketa

internasional dalam 7 (tujuh) bab yang terdiri atas: Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai; Sengketa Internasional secara Diplomatik; Arbitrase Internasional Publik; Mahkamah Internasional PBB dan Sengketa Internasional; Penyelesaian Sengketa dalam GATT/WTO. Juga sebagai pelengkap disertakan lampiran berupa konvensi, perjanjian kerjasama dan deklarasi yang ada kaitannya dengan penyelesaian sengketa internasional.

Buku yang berkualitas ini diharapkan dapat menjadi buku pegangan wajib dalam mata kuliah hukum internasional. Hal tersebut mengingat belumlah adanya buku-buku yang membahas tentang hukum penyelesaian sengketa internasional secara komprehensif dan integral. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi bagi khazanah literatur hukum internasional di tanah air.



Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II, ed 1

Author : Badri Yatim
No. Class : 297.7 YAT s
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

Description:

Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW telah mem-bawa bangsa Arab yang semula terbelakang, bodoh, tidak terkenal dan diabaikan oleh bangsa-bangsa lain, menjadi bangsa yang maju. Ia dengan cepat bergerak mengembangkan dunia, membina satu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting artinya dalam sejarah manusia hingga saat ini. Bahkan kemajuan Barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam yang masuk ke Eropa melalui Spanyol. H.A.R. Gibb dalam bukunya Whitter Islam menyatakan, Islam sesungguhnya lebih dari sekedar sebuah agama, ia adalah sebuah peradaban yang sempurna.

Sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode, klasik, pertengahan dan modern. Pada periode klasik kebudayaan dan peradaban Islam identik dengan ke-budayaan dan peradaban Arab sejalan dengan dominasi bangsa Arab dalam pemerintah dan bahasa. Pada periode berikutnya, mulai terjadi perubahan-perubahan signifikan dengan muncul dan berkembangnya beberapa peradaban Islam. Sampai saat ini, tercatat empat kawasan pengaruh kebudayaan Persia, kawasan pengaruh kebudayaan Turki dan kawasan pengaruh kebudayaan India-Islam yang selalu menjadi objek kajian ke-Islaman kontemporer. Pengkajian sejarah Islam di Indonesia mendapatkan porsi cukup besar dalam buku ini mengingat penyebaran Islam di nusantara memiliki corak yang khas.

Materi buku ini dengan uraian sejarah peradaban Islam-nya menjadi bahan yang sangat penting dan berguna bagi mereka yang berminat pada studi ke-Islaman, antara lain mahasiswa dan pengajar dari fakultas-fakultas keagamaan di perguruan tinggi.



Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ed 1

Author : Rio Christiawan
No. Class : 346.078 CHR h
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

Description:

Di dalam buku ini dijelaskan berbagai hal yang menjadi substansi kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana menjadi substansi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hingga aturan pelaksanaannya maupun Pasal terkait dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan berbagai macam draf seperti draf penyusunan kuasa dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, penyusunan proposal perdamaian, gugatan, dan jawaban penundaan kewajiban pembayaran utang, hingga berbagai macam pengumuman di media massa terkait dengan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sehingga buku ini akan dapat diaplikasikan dalam penanganan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada pengadilan niaga.

Buku ini disusun secara sistematis sehingga persoalan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat, utamanya dunia usaha. Dengan demikian, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat berlaku efektif sebagaimana semangat awal pembentukannya, yakni menjaga kelangsungan usaha dan perekonomian. Penyajiannya yang dalam format teori dan praktik membuat buku ini dapat dipergunakan oleh semua kalangan seperti akademisi, praktisi hukum seperti advokat, notaris, kurator, pengurus, banker, pelaku usaha, hingga para penegak hukum.



Hukum Lingkungan di Indonesia, ed 3

Author : Takdir Rahmadi
No. Class : 344.046 RAH h
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

Description:

Hukum lingkungan merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum. Sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum, hukum lingkungan tidak semata mengkaji atau mengurus pengaturan-pengaturan atau doktrin-doktrin hukum terkait pengelolaan lingkungan, namun juga pengaturan-pengaturan atau doktrin-doktrin hukum terkait penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, bahan tambang, dan sebagainya. Singkat kata, hukum lingkungan terkait dengan pengaturan (yuridis) bagi pelestarian serta pemanfaatan lingkungan hidup.

Buku ini membahas tentang hukum lingkungan di Indonesia. Di dalamnya dipaparkan tentang pengertian dan pembedaan hukum lingkungan, posisi hukum lingkungan dalam konteks ilmu hukum, teori-teori pengembangan hukum lingkungan, latar belakang pengembangan hukum lingkungan norma-norma, asas-asas, hak dan kewajiban, kewenangan dan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup pengaturan-pengendalian pencemaran lingkungan hidup pengaturan pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian lingkungan hidup hingga penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian sengketa lingkungan. Lewat membaca buku ini, pembaca akan terbantu memahami persoalan lingkungan dan juga bagaimana penanganannya dilihat dari perspektif hukum atau yuridis.

Buku ini dapat dibaca oleh para mahasiswa dan para pengajar yang berasal dari Fakultas Hukum. Selain itu, buku ini dapat dibaca pula oleh para peminat, pemerhati atau penggiat di bidang lingkungan hidup atau juga hukum lingkungan.



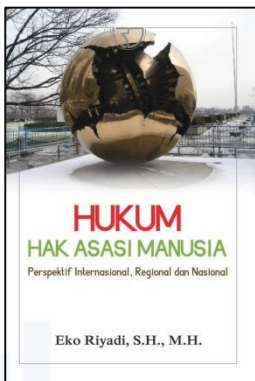
Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia

Author : Abdul Ghofur Anshori
No. Class : 297.545 98 ANS f
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

Description:

Hibah dan wasiat merupakan lembaga hukum yang dikenal dalam berbagai sistem hukum. Dalam konteks Indonesia lembaga ini dikenal dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Inti dari hibah adalah pemberian secara sukarela dari seseorang atau lebih terhadap orang lain, sedangkan wasiat adalah sebuah pernyataan yang berisi penggunaan atas harta benda yang dimiliki, kelak di kemudian hari ketika yang bersangkutan meninggal dunia.

Kepemilikan terhadap harta di dalam Islam diatur dan diarahkan untuk kemaslahatan. Hal ini terkait dengan konsep hak milik dalam Islam yang memberikan batasan-batasan bagi pemilik harta baik dari cara perolehannya maupun cara pembelanjanya. Karena itulah dalam Islam perlindungan terhadap harta menjadi salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam (al-maqashid al-syariah) yang utama (dharuriyah/mutabarrah) selain perlindungan terhadap agama Islam, jiwa, akal, dan kehormatan (keturunan). Melalui Hibah dan Wasiat, Insya Allah dapat menjadi salah satu mekanisme untuk mewujudkan al-maqashid al-syariah dimaksud.



Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional

Author : Eko Riyadi
No. Class : 341.48 RIY h
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

Description:

Di Indonesia, sering terjadi perdebatan mengenai hukum hak asasi manusia menginduk pada hukum apa. Buku ini memberi jawaban bahwa hukum hak asasi manusia justru harus menjadi rujukan bagi pembahasan kategori hukum lain. Hukum hak asasi manusia seyogianya menjadi ruh hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, dan juga hubungan internasional.

Buku ini adalah buku paling lengkap yang membahas pelbagai aspek hukum hak asasi manusia, mulai dari fondasi filosofis, pilar instrumen, dan mekanisme implementasi dan pengawasannya. Buku ini menjangkau pembahasan dari instrumen internasional, regional dan nasional. Keistimewaan buku ini ada dua, yaitu pendekatannya yang memadukan (blended approach) hukum internasional dan hukum nasional menjadi satu pembahasan utuh, dan runtutnya penulisan mulai dari aspek teoretik, instrumen internasional, instrumen regional dan diakhiri dengan instrumen nasional.

Berdasar pada elaborasi singkat di atas, buku ini layak dibaca oleh semua orang yang belajar dan bekerja di ranah hukum, kebijakan publik, dan hubungan internasional.



Hukum Perbankan Nasional Indonesia, ed 3

Author : Hermansyah
No. Class : 346.08 HER h
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

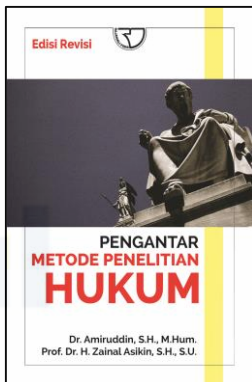
Description:

Buku ini menyajikan semua aspek hukum yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia. Benang merah pembahasannya meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha dari suatu bank. Di antara inti pembahasan dalam buku ini adalah:

- Pengantar tentang sistem keuangan, perbankan, dan hukum perbankan di Indonesia.
- Sumber dana perbankan di Indonesia.
- Jasa-jasa perbankan.
- Kredit bank dan jaminan.
- Surat-surat berharga dan warkat perbankan dalam praktik perbankan.

- Kerahasiaan bank.
- Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana.
- Tindak pidana di bidang perbankan.
- Pengaturan pidana di bidang perbankan.
- Pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia.
- Arsitektur Perbankan Indonesia.
- Otoritas jasa keuangan (OJK).

Pada Edisi Ketiga ini terdapat penambahan topik bahasan penting: (1) Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) (2) Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan (3) Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (4) Arah Kebijakan Perbankan dan (5) Tahap-tahap Implementasi Arsitektur Perbankan.



Pengantar Metode Penelitian Hukum, ed rev

Author : Amiruddin dan Zainal Asikin
No. Class : 340.072 AMI p
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

Description:

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dengan melakukan penelitian, seorang dapat mengetahui apa yang menjadi penyebab sebuah gejala dan bagaimana ia timbul dan sebagainya. Di bidang hukum, penelitian juga dibutuhkan bukan hanya untuk melihat dan mengukur efektivitas penerapan hukum, namun juga dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah ke depan apa yang mesti diambil berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

Buku ini menyajikan perihal metode penelitian hukum. Terdiri dari beberapa bab, buku ini diawali dengan pengenalan mengenai apa itu penelitian dan hal-hal terkait dengannya. Kemudian disambung dengan pemaparan mengenai langkah-langkah dalam penelitian dan teknik sampling. Berikutnya disampaikan terkait bentuk penelitian hukum, pengolahan dan analisis data, hingga penulisan laporan penelitian. Di akhir bab dipaparkan perihal pemanfaatan ilmu sosial dalam penelitian hukum. Materi-materi yang disajikan di buku ini amat bermanfaat dan membantu bagi mereka yang hendak melakukan penelitian di bidang hukum mulai dari apa saja yang mesti dipersiapkan, bagaimana melakukannya, hingga tahap akhir yakni menyusun laporan hasil penelitian.

Buku ini dapat dibaca oleh para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Di samping itu, dapat dibaca pula oleh para akademisi, praktisi dan juga para pengambil kebijakan hukum.



Kriminologi Suatu Pengantar, ed 1

Author : A.S. Alam dan Amir Ilyas
No. Class : 364 ALA k
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

Description:

Sejak berdiri sebagai disiplin ilmu tersendiri, kriminologi terus berkembang. Kriminologi tidak lagi hanya menjadi science for science melainkan telah menjelma sebagai science for the welfare of society atau ilmu untuk kesejahteraan sosial. Perkembangan ini juga didukung dengan munculnya lembaga kriminologi di berbagai perguruan tinggi.

Kehadiran kriminologi: suatu pengantar tidak terlepas dari reaksi terhadap pengembangan ide-ide, baik dalam penelitian kriminologi oleh para akademisi dari berbagai strata di perguruan tinggi, maupun penerapan kriminologi oleh para praktisi sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum.

Buku ini merupakan tanggapan akademik terhadap perkembangan kriminologi yang kian pesat, sementara buku teks ajar berbahasa Indonesia dapat dikatakan sangat langka. Krenanya, penambahan materi di dalamnya bertujuan semata agar mahasiswa dan dosen lebih mudah memahami dan tertarik untuk menekuni bidang ini.



Serba-serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia

Author : Abdul Wahid dan Rohadi
No. Class : 346.02 WAH s
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

Description:

Hukum perjanjian merupakan bagian dari kajian Hukum Perdata, yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai pedoman berisi hak dan kewajiban dalam hubungan hukum bersifat private yang mempunyai kepentingan dalam ruang lingkup harta kekayaan.

Buku ini disusun dalam rangka untuk memudahkan pembelajaran bagi kalangan pelajar/mahasiswa/umum yang ingin memahami hukum perjanjian di Indonesia. Setelah membaca buku ini diharapkan dapat mengerti dan memahami serta mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum perjanjian, membuat dokumen hukum, menemukan hukum dan menyusun strategi dalam penyelesaian masalah hukum perjanjian serta mampu bernegosiasi terhadap penyelesaian masalah-masalah hukum dalam masyarakat sesuai ketentuan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia.



Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW)

Author : Sakka Pati dan Ahmad Miru
No. Class : 346.02 MIR h
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

Description:

Hampir semua orang melakukan perjanjian setiap hari, hanya saja tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan hubungan hukum yang diatur dalam hukum perjanjian. Oleh karena itu, hukum perjanjian mengatur berbagai hubungan hukum antara para pihak, baik itu yang dilakukan secara tertulis maupun yang tidak tertulis.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mengetahui aturan hukum dalam perjanjian yang mereka buat. Karena buku ini memuat ketentuan yang terkait dengan berbagai macam perjanjian, baik yang sering dilakukan maupun yang jarang dilakukan.

Buku ini sangat dibutuhkan mahasiswa dalam memahami ketentuan yang mengatur berbagai macam perjanjian karena memuat ulsan singkat dari berbagai macam perjanjian dan ketentuan dalam KUH Perdata (BW) yang disertai penjelasannya.



Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial

Author : Agus Yudha Hernoko
No. Class : 346.02 HER h
Location : Jakarta, Tangerang dan Bekasi

Description:

Dalam dunia bisnis, pertukaran kepentingan antar pelaku bisnis merupakan hal yang lazim terjadi. Permasalahannya timbul ketika pertukaran kepentingan ini harus berlangsung secara proporsional, saling menguntungkan, dan tidak berat sebelah atau tidak seimbang. Dari sudut pandangan tersebut, hukum kontrak memainkan peran krusial sebagai penjamin berlakunya asas proporsionalitas di seluruh proses kontrak, mulai dari perundingan, pembentukan, dan pelaksanaan perjanjian atau kontrak tersebut. Sehingga hukum ini diharapkan dapat mendukung dan memfasilitasi kebutuhan para pelaku bisnis serta meminimalisasi terjadinya sengketa di masa yang akan datang.

Pembahasan dalam buku ini dibagi dalam empat bagian besar. Bahasan utama tentang asas proporsionalitas akan dipaparkan di bagian kedua dan ketiga setelah bagian pertama yang mengantarkan pembaca kepada berbagai faktor yang mendorong dan mendasari penulisan buku ini. Dalam pembahasan utama dikemukakan makna dan fungsi asas proporsionalitas dalam kontrak komersial dan filosofi keadilan dalam pra kontrak penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan kontrak, dan penerapan kontrak berikut akibat hukum yang ditimbulkan.